

Mulai 1 Oktober, Super Air Jet Kembali Layani Rute Makassar-Baubau Setiap Hari, Tiket Dibawah Rp1 Juta



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Konektivitas udara masyarakat Kepulauan Buton menuju Makassar kembali diperkuat setelah Super Air Jet (SAJ) dipastikan melayani rute Makassar (UPG)-Baubau (BUW) pulang-pergi mulai 1 Oktober 2026. Penerbangan reguler tersebut dijadwalkan berlangsung setiap hari melalui Bandara Betombang dengan kapasitas sekitar 200 penumpang per hari.

Kepastian itu disampaikan Kepala Bandara Betombang Baubau Anas La Bakara, Kamis (24/9/2026).

Menurut dia, pengoperasian kembali SAJ merupakan hasil dukungan Pemerintah Kota Baubau bersama pemerintah daerah di Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, dan Buton Utara untuk memperkuat akses transportasi udara kawasan Kepulauan Buton.

“Mulai 1 Oktober nanti, Super Air Jet akan kembali beroperasi di Bandara Betombang. Ini adalah dukungan konkret dari Wali Kota Baubau bersama para bupati se-Kawasan Buton,” kata Anas.

Lanjut ke Hal: 7

Kemenhaj Busel Matangkan Persiapan Haji, Geo-Visa 21 Jemaah Capai 50 Persen

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Buton Selatan mematangkan persiapan keberangkatan 21 calon jemaah haji yang telah terdaftar sejak Juli 2026. Pengurusan paspor dan pemeriksaan kesehatan seluruh calon jemaah telah rampung, sedangkan pengajuan



Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Buton Selatan, Hj. Nurhayati

geo-visa kini mencapai 50 persen.

Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Buton Selatan, Hj. Nurhayati, mengatakan tahapan administrasi tersebut sejauh ini berlangsung tanpa kendala berarti. Pemerintah, kata dia, terus mengawal kelengkapan dokumen agar proses menuju keberangkatan dapat berjalan tertib

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Azhari Terima Tim Kemensos untuk Verifikasi Aset SR Buteng, Program Pendidikan Disiapkan Bertahap

Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mematangkan persiapan dua program pendidikan nasional, yakni Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Negeri Terpadu (SNT), setelah daerah itu masuk dalam tahap pertama pelaksanaan kedua program tersebut. Verifikasi akhir aset untuk mendukung operasional SR menjadi salah satu agenda yang dibahas bersama tim Kementerian So-



sial (Kemensos) RI di ruang kerja Bupati Buton Tengah, Rabu (23/9/2026).

Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, mengatakan tim Kemensos

melakukan verifikasi terhadap aset yang akan diserahkan untuk mendukung operasional SR. Dalam pertemuan yang sama, pemerintah daerah

juga membahas pemanfaatan sejumlah aset yang sebelumnya digunakan di Kampus B Universitas Sem-

Lanjut ke Hal: 7

Gandeng Kejari Buton, Pemkab Buton Selatan Bekali Aparatur Soal Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Pemkab Buton Selatan menggandeng Kejaksaan Negeri Buton untuk perkuat pemahaman aparat soal gratifikasi, benturan kepentingan, dan suap.

Kegiatan digelar di Aula Kantor Bupati Buton Selatan, Batauga, Kamis (24/9/2026), dan diikuti Sekda, seluruh kepala OPD serta jajaran aparat.

Materi sosialisasi meliputi gratifikasi, benturan kepentingan, dan suap, sebagai upaya mencegah potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kegiatan ini juga bagian dari persiapan menghadapi Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, yang menilai pengawasan, kepegawaian, PTSP, dan tata kelola keuangan.

Pemkab Busel berharap, peningkatan integritas aparat dapat memperkuat pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Integritas Aparatur, Kunci Pelayanan Publik yang Lebih Baik

STOP GRATIFIKASI

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memperkuat pencegahan korupsi dengan meningkatkan pemahaman aparat mengenai gratifikasi, benturan kepentingan, dan suap. Langkah tersebut ditempuh melalui sosialisasi yang melibatkan Kejaksaan Negeri Buton di Aula Kantor Bupati, Batauga, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan itu menjadi bagian dari persiapan Pemkab Buton Selatan menghadapi Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa hari sebelumnya, Tim Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pencegahan KPK telah mengunjungi pemerintah daerah tersebut untuk mengevaluasi kesiapan pelaksanaan SPI.

Kepala Inspektorat Buton Selatan Syamsir Sariman mengatakan, SPI menilai

Lanjut ke Hal: 7

Baubau Masuk Dua Besar TPID Berkinerja Terbaik Sulawesi Tahun 2026



Laporan: Prwasetio M

BAUBAU, BP- Kota Baubau menempati peringkat kedua kategori Kabupaten/ Kota Berkinerja Terbaik Wilayah Sulawesi dalam TPID Award 2026. Penghargaan tersebut diumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Penghargaan itu menjadi pengakuan atas kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Baubau dalam menjaga stabilitas

harga dan pasokan di daerah. Posisi tersebut sekaligus menempatkan Baubau sebagai salah satu daerah di Sulawesi yang dinilai memiliki kinerja baik dalam pengendalian inflasi.

Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Menurut dia, penghargaan itu harus menjadi pemacu untuk memperbaiki kinerja pengendalian inflasi pada tahun-tahun berikutnya.

“Pencapaian ini merupakan hasil pe-

nilaian dari banyaknya kota di Indonesia. Hal ini menjadi semangat dan motivasi bagi Pemerintah Kota Baubau untuk terus meningkatkan capaian serta target penangan inflasi ke depannya,” ujar Yusran.

Pengendalian inflasi menjadi penting karena perubahan harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Secara nasional, pemerintah mulai membangun kerangka pengendalian inflasi daerah secara lebih terkoordinasi sejak pembed-

Lanjut ke Hal: 7

Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong, DPR Minta Polri dan BPK Bergerak



DPR RI akan memanggil Ombudsman pekan depan terkait temuan sidak soal dugaan fasilitas mewah napi di Lapas Cibinong.

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Temuan fasilitas yang diduga mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memasuki babak baru setelah Komisi III DPR RI meminta Polri melakukan penyelidikan. Pengusutan didorong untuk memastikan apakah temuan inspeksi mendadak Ombudsman RI hanya merupakan persoalan administrasi atau memiliki unsur pidana.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan dugaan pelanggaran harus ditelusuri berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Ia meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan internal apabila terdapat indikasi tindak pidana, termasuk dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

"Polri harus mengusut tuntas kasus ini dengan melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan Ombudsman," kata Abdullah dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).

Dorongan tersebut muncul setelah Ombudsman melakukan sidak di Lapas Cibinong pada September 2026. Dalam pemeriksaan itu, Ombudsman menyec-

beberapa tipe kamar dalam kawasan yang disebut sebagai kluster mewah, area parkir mobil mewah, serta dugaan praktik pungutan liar. Ombudsman juga menyatakan proses pemeriksaan sempat mengalami hambatan dari pihak lapas.

Persoalan itu kemudian dijadwalkan dibahas dalam forum DPR. Komisi XIII DPR RI akan memanggil Ombudsman, Dirjen Imipis Kementerian Imigrasi dan Pemasaran, Kakanwil Ditjen PAS Jawa Barat, serta Kalapas Cibinong pada Senin (28/9). Pemanggilan tersebut ditujukan untuk meminta penjelasan mengenai temuan sidak dan langkah tindak lanjut dari instansi terkait.

Abdullah meminta pemeriksaan dilakukan dari dua sisi. Jika ditemukan pelanggaran administratif atau disiplin oleh pegawai, mekanisme sanksi administrasi dapat diterapkan. Namun, apabila penyelidikan menemukan unsur pidana, perkara tersebut diminta diproses sesuai ketentuan hukum.

Selain Polri, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pengelolaan anggaran dan aset Lapas Cibinong. Audit dinilai dapat memberikan gambaran mengenai ada atau tidaknya penyimpangan dalam peng-

gunaan anggaran dan aset negara.

"Audit BPK adalah salah satu pintu masuknya. Dari sana harus dilihat apakah ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun aset," ujar Abdullah. Ia juga meminta Ditjen Imipis dan Polri menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada publik.

Di sisi lain, Kementerian Imipis belum menyimpulkan adanya pelanggaran pidana dalam temuan tersebut. Menteri Imipis Agus Andrianto saat meninjau Lapas Cibinong pada Jumat mengatakan pihaknya masih akan melakukan investigasi, termasuk pemeriksaan penggunaan aset yang disebut sebagai rumah dinas pegawai.

"Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain," kata Agus. Ia menyebut hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah penertiban lebih lanjut di lingkungan pemasyarakatan.

Persoalan pengawasan lapas tersebut berlangsung dalam konteks fungsi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Secara historis, Komisi Ombudsman Nasional

dibentuk pada 10 Maret 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Kedudukannya kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang mulai berlaku pada 7 Oktober 2008.

Dalam konteks internasional, standar pengelolaan penjara juga berkembang melalui Nelson Mandela Rules. Aturan yang diadopsi Majelis Umum PBB pada Desember 2015 tersebut memperbarui standar minimum perlakuan terhadap tahanan yang pertama kali dirumuskan PBB pada 1955. Standar itu menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, kondisi penahanan yang layak, serta pengelolaan penjara yang aman dan manusiawi.

Dengan demikian, tindak lanjut atas temuan di Lapas Cibinong kini mencakup pemeriksaan administratif, kemungkinan penyelidikan pidana, serta audit terhadap anggaran dan aset. Hasil pemeriksaan dari lembaga-lembaga terkait akan menentukan apakah temuan tersebut berujung pada sanksi administratif, penertiban internal, atau proses hukum lebih lanjut. (*)

Megawati Jenguk Guruh Soekarnoputra, PDIP Gelar Doa Bersama



Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, telah menjenguk adiknya, Guruh Soekarnoputra, yang tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta.

Kabar tersebut disampaikan politikus PDIP Guntur Romli. Menurut Guntur, Megawati menyempatkan diri menemui Guruh sebelum menjalankan agenda kerja partai di Sulawesi Utara.

Guntur mengatakan kedekatan Megawati dengan Guruh menjadi alasan keluarga dan partai meminta masyarakat turut memberikan doa bagi kesembuhan putra Presiden pertama RI Soekarno tersebut.

"Sudah (menjenguk). Mas Guruh itu adik kesayangan Ibu," kata Guntur saat dihubungi.

Di tengah perawatan Guruh, PDIP juga menyiaipkan doa bersama. Guntur menyampaikan kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan moral bagi keluarga dan permohonan kesembuhan untuk Guruh.

"Kami juga menggelar doa bersama untuk Mas Guruh," ujarnya.

Belum diketahui secara pasti sejak kapan Guruh Soekarnoputra

dirawat di Siloam Semanggi. Pihak yang menyampaikan informasi tersebut juga belum memberikan keterangan mengenai penyakit atau kondisi medis yang menyebabkan Guruh harus menjalani perawatan intensif.

Guntur meminta masyarakat Indonesia ikut mendoakan kondisi Guruh. "Mohon doa dari masyarakat Indonesia untuk kesembuhan Mas Guruh Soekarnoputra," katanya.

Guruh Soekarnoputra merupakan putra Presiden Soekarno dan Fatmawati. Ia lahir di Jakarta pada 13 Januari 1953 dan dikenal luas sebagai seniman, terutama dalam bidang musik, tari, serta kebudayaan. Kiprahnya menempatkan Guruh sebagai salah satu figur dari keluarga Soekarno yang lama berkecimpung dalam kehidupan seni dan kebudayaan Indonesia.

Secara historis, keluarga Soekarno memiliki posisi penting dalam perjalanan politik dan kebudayaan Indonesia. Soekarno memimpin Indonesia sebagai presiden pertama sejak 1945 hingga 1967, sementara sejumlah anaknya kemudian terlibat dalam kehidupan publik dengan bidang yang berbeda.

Megawati menempuh jalur politik dan menjadi Presiden RI pada 2001-2004, sedangkan

Guruh lebih dikenal melalui karya seni dan kebudayaan.

Guruh juga pernah terlibat dalam politik praktis melalui PDI Perjuangan. Kehadirannya dalam ruang publik berlangsung bersamaan dengan kiprahnya sebagai seniman yang mengembangkan berbagai karya bernuansa kebudayaan Indonesia.

Dalam sejarah dunia, perhatian publik terhadap kondisi kesehatan tokoh dari keluarga politik maupun keluarga pendiri negara juga bukan fenomena baru. Keluarga tokoh seperti John F. Kennedy di Amerika Serikat, Mahatma Gandhi di India, hingga keluarga kerajaan dan keluarga politik di berbagai negara kerap menjadi perhatian karena posisi historis mereka dalam kehidupan publik. Namun, informasi mengenai kondisi medis seseorang tetap bergantung pada keterangan resmi keluarga atau pihak yang berwenang.

Hingga kini, informasi mengenai perkembangan kesehatan Guruh Soekarnoputra masih terbatas. PDIP mengajak masyarakat memberikan doa, sementara keterangan lebih lanjut mengenai kondisi Guruh diharapkan berasal dari keluarga atau pihak rumah sakit. (*)

APBD Perubahan Sultra 2026 Naik, Belanja Daerah Diusulkan Rp4,74 Triliun



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengusulkan perubahan struktur APBD 2026 dengan total belanja daerah meningkat menjadi Rp4,74 triliun. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tersebut diserahkan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka kepada DPRD Sultra dalam rapat paripurna di Ruang Paripurna Gedung A Sekretariat DPRD Sultra, Selasa (22/9/2026) malam.

Kenaikan belanja itu merupakan bagian dari penyesuaian APBD 2026 menyusul perubahan pada penerimaan dan belanja negara. Dalam rancangan yang diajukan, belanja daerah bertambah sekitar Rp671,12 miliar dari pagu sebelumnya Rp4,07 triliun menjadi Rp4,74 triliun.

Pada saat yang sama, pendapatan daerah juga diproyeksikan meningkat dari Rp4,06 triliun menjadi Rp4,56 triliun. Dengan demikian, terdapat tambahan pendapatan sekitar Rp505 miliar yang antara lain berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pemerintah pusat.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan naik Rp165,67 miliar, dari sebelumnya

ya Rp69,73 miliar menjadi Rp235,40 miliar. Tambahan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.

Andi Sumangerukka mengatakan perubahan anggaran tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menyesuaikan struktur fiskal daerah, tetapi juga menjaga agar program pembangunan yang telah ditetapkan tetap berjalan. Fokusnya mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ketahanan pangan berbasis agromaritim.

“Perubahan APBD Tahun 2026 diharapkan dapat fokus pada penyelesaian pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujar Andi dalam rapat paripurna tersebut.

Sebelum rancangan perubahan APBD diserahkan, Pemprov Sultra dan DPRD telah menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026. Kesepakatan itu menjadi dasar untuk memasuki pembahasan Rancangan Perubahan APBD bersama DPRD.

Secara kebijakan, perubahan APBD merupakan bagian

dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan anggaran dengan perkembangan kondisi selama tahun berjalan. Kerangka pengelolaan keuangan daerah saat ini antara lain mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019, yang menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan memperbarui sejumlah ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Mekanisme tersebut tidak terlepas dari perjalanan desentralisasi Indonesia. Desentralisasi dan desentralisasi fiskal mulai diterapkan secara luas sejak 2001, ketika sejumlah kewenangan pemerintahan dan pengelolaan fiskal dialihkan kepada daerah. Transfer dari pemerintah pusat kemudian menjadi salah satu instrumen pembiayaan daerah sekaligus mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional di daerah.

Dalam konteks Sultra, penyesuaian anggaran 2026 diharapkan untuk mendukung target pembangunan nasional di daerah sekaligus sasaran prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Gubernur menekankan agar peningkatan anggaran tidak berhenti pada perubahan an-

gka dalam dokumen keuangan, tetapi diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Setiap program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan nya menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Andi.

Gubernur selanjutnya meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sultra mengikuti pembahasan perubahan APBD secara baik dan tuntas. Langkah itu ditujukan untuk memastikan target kinerja serta sasaran program yang telah direncanakan dapat tercapai.

Andi berharap pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 bersama DPRD Sultra berlangsung sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditentukan hingga mencapai kesepakatan. Dengan demikian, program pembangunan yang telah masuk dalam perubahan anggaran dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai target tahun anggaran 2026. Kerangka hubungan pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri berada dalam sistem yang diatur antara lain melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (*)

Meta’u’a Siompu Didorong Masuk Kalender Budaya Sultra dan Jadi Magnet Wisata



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Tradisi meta’u’ayang mempertemukan enam desa dalam persekutuan Binawakili, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, didorong naik kelas menjadi agenda budaya tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah provinsi menilai tradisi tersebut memiliki kekuatan sosial dan budaya yang dapat dikembangkan sekaligus menjadi daya tarik wisata serta penggerak ekonomi masyarakat.

Gagasan itu disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ridwan Badala, ketika menghadiri pelaksanaan meta’u’adi Siompu, Minggu (20/9/2026). Perhelatan tersebut melibatkan masyarakat Desa Biwinapada, Nggulanggula, Wakinamboro, Batuwawu, Lapara, dan Tongali yang menyatu dalam satu pahuga.

Ridwan melihat persatuan enam desa sebagai modal sosial yang tidak sekadar memiliki nilai adat. Kekompakan dan semangat gotong royong yang masih terpelihara dinilai dapat

menjadi bagian dari identitas budaya daerah apabila dikemas secara berkelanjutan.

“Enam desa menyatu dalam satu pahuga, jiwa persaudaraan yang patut dicontoh. Semangat ini harus terus dihidupkan, tidak boleh putus di tengah jalan,” kata Ridwan di hadapan masyarakat.

Rencana tersebut akan diarahkan pada penguatan promosi budaya dan pariwisata. Ridwan mengatakan, dalam waktu dekat dirinya bersama sejumlah pemangku kepentingan akan berangkat ke Tiongkok untuk mempromosikan potensi Sulawesi Tenggara, termasuk kekayaan budaya dan destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten Buton Selatan.

Menurut Ridwan, pengembangan meta’u’a sebagai agenda budaya perlu diikuti pengemasan potensi darat dan laut di sekitarnya. Ia menilai kekayaan budaya yang masih terjaga dapat menjadi keunggulan tersendiri karena tidak hanya mempertahankan warisan masyarakat, tetapi juga berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru.

“Insya Allah, kami akan memasukkan ini ke dalam kalender acara provinsi agar semakin dikenal luas,” ujarnya. Ia juga menilai kawasan tersebut berpotensi dikembangkan sebagai pusat budaya yang dapat menarik wisatawan sekaligus memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.

Secara historis, pengembangan tradisi lokal sebagai bagian dari pariwisata bukan fenomena baru. Indonesia sejak lama mengenalkan keragaman adat, seni, dan tradisi sebagai bagian dari identitas kebudayaan dan daya tarik wisata; sementara secara global, UNESCO melalui Konvensi 2003 menempatkan warisan budaya takbenda “termasuk tradisi, praktik sosial, dan perayaan” sebagai kekayaan yang perlu dilindungi dan diwariskan. Dalam konteks Siompu, Ridwan mengingatkan pengembangan budaya harus berjalan bersama pemerataan pelayanan publik, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan agar manfaat pelestarian tradisi benar-benar dirasakan masyarakat. (*)

Guru Ngaji MDT Buton Tengah Perkuat Pendidikan Al-Qur'an dan Karakter Anak



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pendidikan keagamaan bagi anak-anak di Kabupaten Buton Tengah diperkuat melalui kegiatan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) yang berlangsung di sejumlah sekolah, masjid, dan musala. Pembelajaran tidak hanya diarahkan agar santri mampu membaca Al-Qur'an, tetapi juga membentuk kedisiplinan, kesantunan, tanggung jawab, dan karakter religius sejak usia sekolah.

Kegiatan tersebut menjangkau sejumlah satuan pendidikan, antara lain SDN 1 Kecamatan Sangiawambulu melalui Masjid Baaburahmah, SDN 19 Kecamatan Lakudo melalui Masjid Baiturrahman, serta SDN 3 Kecamatan Mawasangka Tengah melalui Masjid Al-Bashir. Pembelajaran juga dilaksanakan di SD Integral Ali bin Abi Thalib.

Di Kecamatan Lakudo, kegiatan MDT berlangsung melalui Musala H. Muhammad Yusuf, Desa Moko, yang menjadi tempat pembelajaran bagi peserta didik SDN 12. Sementara di Kecamatan Gu, pembelajaran dilaksanakan melalui Masjid Al-Ikhsan Lombe

bersama SDN 10 dan melalui Masjid Al-Mukminun serta Masjid Jabal Nur Desa Waliko bersama SDN 9.

Jangkauan kegiatan juga mencakup SDN 6 Kecamatan Sangiawambulu melalui Masjid Nurul Falah, Doda Bahari, SDN 2 Kecamatan Mawasangka Tengah, serta SDN 20 Kecamatan Mawasangka melalui Masjid Nabawi, Desa Dahiango. Di Kecamatan Talaga Raya, pembelajaran berlangsung melalui Masjid Nurul Jannah bersama SDN 5 Desa Kokoe.

Materi pembelajaran diberikan secara bertahap sesuai kemampuan santri. Guru ngaji mengajarkan pengenalan Iqra dan tanda baca, baca tulis Al-Qur'an, setoran hafalan, doa iftitah, hingga tajwid. Pola bertahap tersebut membuat kemampuan membaca Al-Qur'an menjadi bagian dari proses pembentukan kebiasaan belajar keagamaan.

"Pembelajaran tidak berhenti pada kemampuan membaca Al-Qur'an, tetapi juga menjadi ruang untuk menanamkan nilai keagamaan dan karakter kepada anak," demikian substansi pelaksanaan pembelajaran MDT di berbagai



lokasi tersebut.

Keberadaan MDT sendiri memiliki akar panjang dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Kementerian Agama mencatat pendidikan diniyah telah berkembang di masyarakat sebelum Indonesia merdeka dan kemudian mengalami perkembangan dari pola pengajaran tradisional menuju sistem yang lebih terstruktur.

Secara regulatif, keberadaan MDT kemudian memperoleh penguatan melalui sejumlah kebijakan. Kajian Kementerian Agama mencatat pengaturan pendidikan diniyah antara lain dimulai melalui PMA Nomor 13 Tahun 1964 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah, kemudian berkembang melalui regulasi berikutnya hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

PMA Nomor 13 Tahun 2014 juga mengatur bahwa kurikulum MDT sekurang-kurangnya mencakup Al-Qur'an, Al-Hadits, fikih, akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Regulasi

tersebut menempatkan MDT sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam yang melengkapi pendidikan agama di jalur pendidikan lainnya.

Dalam konteks global, pendidikan berbasis masjid dan pengajaran Al-Qur'an juga memiliki sejarah panjang di dunia Islam. UNESCO melalui kajian International Institute for Educational Planning mencatat tradisi pendidikan berbasis masjid dan sekolah Al-Qur'an sebagai bagian dari sejarah pendidikan masyarakat Muslim di berbagai negara, termasuk Indonesia, Pakistan, Aljazair, Sudan, Yaman, dan Oman.

Karena itu, kegiatan guru ngaji MDT di Buton Tengah tidak sekadar menjadi aktivitas pembelajaran tambahan bagi siswa. Rangkaian kegiatan di masjid, musala, dan satuan pendidikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan diniyah sekaligus mendukung pembangunan generasi yang memiliki kemampuan keagamaan dan karakter religius, sejalan dengan visi daerah sebagai Kota Santiri dan Kota Pendidikan. (*)

Wabup Risawal Dorong Meta' u'a Jadi Kekuatan Budaya dan Ekonomi di Buton Selatan



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Tradisi Meta' u'a yang dilaksanakan masyarakat adat Binawakili, Buton Selatan, tidak hanya menjadi ruang pelestarian warisan leluhur, tetapi juga dipandang memiliki nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Wakil Bupati Buton Selatan La Ode Risawal mengatakan keberlangsungan tradisi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga identitas masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah.

Meta' u'adilaksanakan masyarakat adat yang tergabung dalam persekutuan enam desa, yakni Biwinapada, Nggulangula, Wakinamboro, Batuawu, Lapara, dan Tongali. Kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu (20/9/2026) dan dihadiri para pemangku adat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

La Ode Risawal menilai kekuatan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur. Menurut dia, kerukunan, solidaritas,

kepedulian, dan kemampuan masyarakat mempertahankan jati diri merupakan unsur yang turut menentukan keberlanjutan pembangunan. Karena itu, tradisi adat perlu ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Meta' u'a bukan hanya sebuah acara adat. Meta' u'a adalah identitas, cara hidup kita. Di dalamnya terkandung nilai menghormati sesama, menjaga kesopanan, bergotong royong, berbagi, dan membangun kebersamaan," kata La Ode Risawal dalam sambutannya.

Secara historis, tradisi adat di berbagai wilayah Indonesia telah menjadi salah satu sarana masyarakat menjaga pengetahuan, norma, dan ingatan kolektif sebelum terbentuknya sistem pemerintahan modern. Di tingkat global, praktik serupa juga dikenal dalam berbagai komunitas adat sebagai mekanisme pewarisan nilai antar generasi. Dalam konteks Meta' u'a, kesinambungan tradisi tersebut menunjukkan hubungan antara kebudayaan, identitas

komunitas, dan kehidupan sosial masyarakat Binawakili.

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, kata La Ode Risawal, memasukkan kebudayaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Pelestarian Meta' u'a juga dapat memberikan dampak ekonomi apabila dikembangkan secara tepat, antara lain melalui kedatangan pengunjung dan terbukanya ruang perdagangan bagi produk masyarakat setempat.

"Melestarikan budaya bukan berarti berjalan mundur. Justeru sebaliknya, budaya adalah kekuatan untuk melangkah maju," ujarnya.

La Ode Risawal menyampaikan apresiasi kepada para pemangku adat, pelaksana kegiatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga yang mempertahankan Meta' u'a secara turun-temurun. Ia berharap tradisi tersebut tetap menjadi ruang untuk memperkuat persatuan sekaligus memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat di enam desa yang tergabung dalam persekutuan adat Binawakili. (*)

Aksi Bergizi di SMA Negeri 1 Lapandewa Sasar Pencegahan Anemia Remaja, Lima Siswi Minum TTD Serentak Cegah Anemia



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-SMA Negeri 1 Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, menjadi lokasi penguatan pencegahan anemia dan stunting melalui Gerakan Cegah Stunting lewat Aksi Bergizi di Sekolah, Kamis (24/9/2026). Kegiatan tersebut menggabungkan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta penandatanganan nota kesepahaman Gerakan Sekolah Sehat.

Pelaksanaan Aksi Bergizi di SMA Negeri 1 Lapandewa ditandai dengan konsumsi TTD secara serentak oleh lima siswi bersama para siswa lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk membentuk kebiasaan hidup sehat sekaligus meningkatkan kesadaran remaja putri terhadap pentingnya pencegahan anemia sejak usia sekolah.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Sijatiku, SKM., M.Kes., mengatakan perhatian terhadap siswa SMA menjadi bagian penting dalam pencegahan masalah gizi jangka panjang. Berdasarkan data Sigizikesga/e-PPGBM dan data riil puskesmas hingga Juli 2026, angka stunting Kabupaten Buton Selatan mencapai 18,2 persen dan berada pada urutan ketiga tertinggi. Sementara itu, wilayah Puskesmas Lapandewa mencatat 28,7 persen atau tertinggi kedua setelah Puskesmas Batu Atas Barat.

“Remaja putri hari ini adalah calon ibu masa depan. Mencegah anemia sejak dini berarti menjaga kesehatan reproduksi sekaligus menekan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah maupun stunting,” kata Sijatiku.

Menurut Sijatiku, data stunting harus dibaca berdasarkan metode pengukurann-

ya. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat prevalensi stunting sebesar 38,9 persen, tetapi angka tersebut tidak dapat dibandingkan langsung dengan data Sigizikesga/e-PPGBM karena terdapat perbedaan sumber, metode, dan waktu pengukuran.

Di SMA Negeri 1 Lapandewa, intervensi tidak hanya menyasar siswa. Pada rangkaian kegiatan yang sama, bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) diberikan kepada dua ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) serta tiga balita penderita stunting dan kurang gizi. Bantuan dari Pemerintah Pusat itu akan diantar langsung ke rumah penerima oleh petugas puskesmas.

Mewakili Bupati Buton Selatan, Asisten II Setda, Drs. La Safilil, M.Si., menegaskan sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku

sehat generasi muda. “Kesehatan adalah modal utama. Semoga ini bukan seremonial belaka, melainkan awal perubahan pola hidup sehat,” ujarnya. Ia mengajak pemerintah, tenaga kesehatan, sekolah, dan pemerintah desa berkolaborasi menurunkan angka stunting.

Penempatan Aksi Bergizi di SMA Negeri 1 Lapandewa juga memperkuat pendekatan pencegahan yang dimulai sebelum seseorang memasuki fase kehamilan. Secara nasional dan global, pencegahan anemia pada remaja putri menjadi bagian dari upaya memperbaiki kesehatan ibu dan anak pada masa mendatang. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Buton Selatan, Kepala Kemenag Buton Selatan, Camat Lapandewa, Kapolsek, Kepala SMA Negeri 1 Lapandewa, para kepala desa, serta para siswa. (*)

Bandung Uji Reformasi JKN, Rujukan Pasien Tak Lagi Berdasarkan Kelas Rumah Sakit

BANDUNG, BP Sistem rujukan pasien dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diuji dengan pola baru di Kota Bandung, Jawa Barat. Melalui Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), pasien nantinya tidak lagi diwajibkan mengikuti jenjang rumah sakit kelas D, C, B hingga A, melainkan langsung diarahkan ke fasilitas kesehatan berdasarkan kompetensi penanganan penyakit.

Uji coba yang berlangsung maksimal 12 bulan itu dimatangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan BPJS Kesehatan melalui kunjungan advokasi pada Kamis (24/9/2026). Selain Bandung, pilot project tersebut dilaksanakan di Kota Makassar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim. Sebelum pertemuan dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, tim lintas instansi meninjau Rumah Sakit Santosa Bandung Central dan RS Advent untuk memeriksa kesiapan tempat tidur, sarana, dan prasarana.

Perubahan rujukan menjadi bagian dari tiga pilar reformasi JKN yang diuji di empat daerah tersebut. Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan fasilitas kesehatan akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan pelayanan menjadi tingkat Dasar, Madya, Utama, dan Paripurna. “Jika pasien di Puskesmas butuh operasi jantung, mereka akan langsung dirujuk ke layanan kesehatan yang memiliki kompetensi menangani hal itu,” kata Kunta.

Pilar kedua adalah Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), yang mengharuskan rumah sakit memenuhi 12 kriteria ruang rawat inap. Standar tersebut

antara lain mencakup ventilasi, pencahayaan, kelengkapan tempat tidur, kepadatan ruang, tirai atau partisi, kamar mandi dalam ruang rawat inap, aksesibilitas kamar mandi, serta outlet oksigen. Ketentuan 12 kriteria KRIS telah dituangkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024.

Pilar ketiga berupa perubahan mekanisme pembayaran klaim melalui Indonesia Diagnosis Related Group (iDRG), yang dirancang menggantikan Indonesia Case Based Group (INA-CBG). Dalam simulasi kasus pasien batu kantong empedu di Jawa Barat, skema lama membutuhkan waktu hingga 38 hari dengan beban klaim Rp36,4 juta. Melalui RBKP dan iDRG, penyelesaian kasus diproyeksikan menjadi 13 hari dengan beban klaim Rp19,9 juta karena kunjungan berulang yang dinilai tidak diperlukan dapat dikurangi.

Pemerintah juga menyiapkan redistribusi pasien agar rumah sakit rujukan tertinggi tidak menjadi titik penumpukan. Kunta menyebut sebagian kasus yang selama ini ditangani Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) sebenarnya berada pada kompetensi dasar dan madya sehingga ke depan dapat diselesaikan di RSUD atau rumah sakit lain sesuai kapasitasnya. “RSHS akan difokuskan untuk menangani kasus berjenjang utama dan paripurna saja,” ujarnya.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan kesiapan daerah menjadi bagian penting dalam perubahan tersebut. Bandung selama ini menjadi salah satu tujuan rujukan pasien dari kota dan kabupaten lain di Jawa Barat. Karena itu, ia berharap pola rujukan baru dapat memperbaiki kecepatan pelayanan sekaligus efisiensi pembiayaan. Farhan juga menargetkan pemenuhan 12 kriteria KRIS tanpa mengorbankan

tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR).

Reformasi tersebut melanjutkan perjalanan panjang JKN sejak program nasional itu mulai berlaku pada 1 Januari 2014. Kerangka hukumnya berakar pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sedangkan BPJS Kesehatan kemudian menjadi pengelola JKN. WHO mencatat JKN berkembang menjadi salah satu skema jaminan kesehatan terbesar di dunia dan pada Desember 2023 telah mencakup lebih dari 260 juta orang atau lebih dari 95 persen penduduk Indonesia.

Namun, perluasan kepesertaan belum otomatis menghapus persoalan akses dan mutu layanan. WHO mencatat tantangan JKN masih mencakup keterbatasan layanan di sejumlah wilayah dan waktu tunggu di fasilitas kesehatan. Pada 2024, WHO dan Kemenkes juga mendorong redistribusi pasien serta sumber daya agar pelayanan primer lebih merata, sejalan dengan agenda transformasi kesehatan Indonesia yang diluncurkan pada 2022.

Selain menguji tiga pilar reformasi, pemerintah akan menggunakan masa pilot project untuk mencari solusi terhadap dua celah dalam sistem jaminan kesehatan, yakni mekanisme penjaminan layanan lintas batas wilayah serta perlindungan biaya pengobatan bagi korban tindak kekerasan yang saat ini belum ditanggung BPJS Kesehatan. Anggota DJSN Mickael Bobby Hoelman berharap Bandung dapat menjadi contoh penerapan reformasi layanan JKN bagi daerah lain, sementara BPJS Kesehatan menekankan sinergi fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah sebagai faktor penting keberhasilan uji coba. (*)

PT FAREN GRAFIKA KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks
Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara				

Bupati Gowa Sitti Husniah Tersangka Pemerasan dan TPPU, Penyidik Siapkan Pemeriksaan



Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri akan segera memanggil Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang untuk diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidik masih mengkaji kemungkinan penahanan setelah pemeriksaan dan perkembangan penyidikan berikutnya.

Penetapan Sitti Husniah sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara di Mabes Polri pada Kamis (24/9/2026). Sehari kemudian, Jumat (25/9), status hukum tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta. Dalam proses penyidikan, polisi sebelumnya telah memeriksa 30 saksi dan empat ahli serta melakukan penggeledahan di rumah jabatan dan Kantor Bupati Gowa pada 21 September 2026.

Ketua Tim Penyidik Kortas Tipidkor Polri Brigjen Hernowo Yulianto mengatakan pemeriksaan sebagai tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat. "Dalam waktu dekat kita akan lakukan pemeriksaan setelah penetapan tersangka," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/9).

Perkara tersebut berkaitan dengan

dugaan pemerasan, pungutan liar, dan gratifikasi dalam pengurusan perizinan di Kabupaten Gowa pada periode 2025-2026. Salah satu perkara yang disorot adalah pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan. Polisi juga mengaitkan perkara dengan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo sebelumnya mengungkapkan empat dugaan aksi pemerasan. Selain pengurusan PKKPR, penyidik menyebut adanya permintaan dana kepada Indomaret dengan dalih CSR sebesar Rp85 juta untuk setiap pembukaan gerai baru.

Dugaan lainnya berkaitan dengan pengurusan PBG, Perumahan Royal Spring. Dalam perkara tersebut, Sitti Husniah disebut meminta satu unit rumah dengan potongan harga 70 persen dari harga awal Rp1,4 miliar sebagai syarat persetujuan bangunan gedung untuk site plan Sakura 2. Penyidik juga mengusut permintaan dana sponsor Rp100 juta kepada Indomaret untuk pembukaan gerai Beautiful Malino, yang kemudian ditransfer kepada penyelenggara kegiatan atau event organizer.

Penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti dari penggeledahan, berupa dokumen fisik dan dokumen elektronik. Penetapan tersangka dilakukan setelah rangkaian penyidikan dan gelar perkara yang melibatkan jajaran Kortas Tipidkor Polri bersama unsur Tipidkor Polda Sulawesi Selatan dan Polresta Gowa.

Hernowo mengatakan keputusan mengenai penahanan belum ditetapkan. Penyidik akan mempertimbangkan perkembangan perkara serta alasan substantif penyidik sebelum menentukan apakah upaya paksa tersebut diperlukan. Hingga Jumat (25/9), Polda Sulawesi Selatan juga menyatakan Sitti Husniah belum ditahan dan menyebut penyidik menilai yang bersangkutan masih kooperatif.

Dari sisi pemerintahan daerah, Pemprov Sulawesi Selatan mulai menyiapkan langkah administratif agar pelayanan publik di Gowa tetap berjalan. Sekretaris Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengatakan pemerintah masih menunggu dokumen resmi mengenai status hukum Sitti Husniah sebagai dasar pengambilan keputusan administratif.

Jufri menjelaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta berarti pengangkatan pelaksana

tugas kepala daerah langsung dilakukan. Proses pemerintahan membutuhkan dasar administrasi dan keputusan formal. Ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sendiri mengatur pemberhentian sementara kepala daerah dalam kondisi tertentu ketika kepala daerah berstatus terdakwa, termasuk perkara tindak pidana korupsi.

"Administrasi negara itu harus tertulis. Atas dasar itu tentu kemudian Bapak Gubernur akan mengambil sikap," kata Jufri. Pemprov Sulsel juga telah memerintahkan Inspektorat Provinsi menurunkan tim untuk mencermati kondisi pemerintahan Kabupaten Gowa dan menyiapkan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri.

Perkara Gowa tersebut berlangsung dalam konteks pemberantasan korupsi yang secara global telah memiliki kerangka kerja melalui United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada 19 September 2006. UNCAC antara lain menjadi kerangka internasional bagi negara-negara untuk memperkuat pencegahan, penindakan, kerja sama, serta pemulihan aset hasil korupsi. (*)

Cegah Karhutla, Prabowo Perintahkan Penyelidikan Korporasi Pembakar Lahan



Presiden RI Prabowo Subianto.

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Pemerintah akan memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membenahi regulasi, memperkuat edukasi masyarakat, serta menelusuri korporasi yang melakukan pembakaran secara sengaja. Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti aturan daerah yang dinilai masih membuka celah pembakaran lahan.

Dalam diskusi bersama akademisi dari sejumlah perguruan tinggi dan lembaga riset di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026), Prabowo mengatakan pemerintah akan menyiapkan dukungan bagi masyarakat agar dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. Dukungan tersebut antara lain berupa penyediaan lahan dan pompa sesuai kebutuhan.

"Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian," kata Prabowo dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/9/2026).

Prabowo juga meminta kewajiban korporasi dalam pencegahan karhutla dijalankan secara nyata. Perusahaan, menurut dia, telah memiliki ketentuan mengenai penyediaan menara pemantau, embung, serta tim pemadam kebakaran yang berasal dari karyawan perusahaan.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan di tingkat tapak. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul, tetapi juga mendorong kesiapan sarana dan personel untuk mende-

teksi serta menangani kebakaran sejak dini.

Di sisi lain, Prabowo menyoroti masih adanya delapan peraturan daerah (Perda) tingkat kabupaten yang memberikan ruang pembakaran lahan hingga dua hektare. Ia menilai ketentuan semacam itu berpotensi menyulitkan pengendalian apabila api menyebar ke area yang lebih luas.

"Masih ada delapan Perda di kabupaten. Bayangkan yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektare, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektare," ujar Prabowo.

Pemerintah juga akan memperluas edukasi kepada masyarakat di wilayah rawan karhutla. Prabowo mengatakan telah menggunakan personel TNI dan mempertimbangkan pengerahan Polri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengelolaan lahan tanpa pembakaran.

"Jadi saya sudah tugaskan TNI, nanti mungkin Polri saya turunkan seribu perwira mayor, letkol, kolonel, seribu saya turunkan ke kabupaten-kabupaten itu untuk memberi edukasi," katanya.

Langkah tersebut ditempuh bersamaan dengan rencana membenah regulasi dan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga melakukan pembakaran secara sengaja. Pemerintah, kata Prabowo, akan terus menertibkan kegiatan korporasi, khususnya yang berkaitan dengan kawasan gambut.

"Kita akan selidiki terus korporasi-korporasi yang melakukan pembakaran sengaja. Yang pertama kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita ha-

rus tegas," kata dia.

Persoalan karhutla bukan perkara baru bagi Indonesia. Data KLHK mencatat luas area terbakar mencapai sekitar 2,6 juta hektare pada 2015 dan sekitar 1,6 juta hektare pada 2019. Pada 2015, kebakaran juga menimbulkan dampak besar terhadap kesehatan, lingkungan dan perekonomian.

World Bank memperkirakan kebakaran 2015 menimbulkan kerugian ekonomi Indonesia sedikitnya US\$16,1 miliar atau sekitar Rp221 triliun, setara 1,9 persen PDB saat itu. Peristiwa tersebut juga menunjukkan dampak lintas batas karena asap kebakaran memengaruhi kualitas udara di kawasan Asia Tenggara.

Pengalaman tersebut kemudian mendorong penguatan kebijakan pengelolaan gambut. Pada Januari 2016, pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut, sementara kebijakan berikutnya mencakup penguatan pencegahan kebakaran, restorasi gambut, pemantauan lapangan, penegakan hukum, dan pengembangan pembukaan lahan tanpa bakar.

Dalam konteks terbaru, isu pengelolaan gambut kembali menjadi perhatian pemerintah. Sehari sebelum diskusi dengan akademisi, Prabowo juga memimpin rapat terkait perkembangan karhutla di Kalimantan dan Sumatra. Pemerintah kemudian menyatakan akan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan karhutla dan pengelolaan ekosistem gambut serta mangrove. (*)

Gandeng Kejari Buton Pemkab Buton Selatan Bekali Aparatur Soal Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

sejumlah aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pengawasan dan kepegawaian hingga pelayanan publik melalui PTSP serta tata kelola keuangan. Karena itu, seluruh aparatur dan pemangku kepentingan diminta memperkuat kualitas pelayanan pemerintahan.

“SPI mencakup indikator pengawasan, kepegawaian, pelayanan publik melalui PTSP, serta tata kelola keuangan. Harapan kami, seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan pelayanan pemerintahan dan publik dengan sebaik-baiknya,” ujar Syamrisal.

Syamrisal mengatakan, materi gratifikasi, benturan kepentingan, dan suap dipilih karena ketiganya memiliki keterkaitan dengan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk memperkuat pemahaman aparatur, Pemkab menggandeng Kajari Buton Sterry Fendy Andih, S.H., M.H., sebagai narasumber. Sekda La Ode Harwanto, S.Pd., M.Pd., serta seluruh kepala OPD dan jajaran aparatur turut hadir.

“Karena itulah kami menggandeng mitra pemerintah daerah, yaitu Kejaksaan, untuk memberikan pemahaman dan penguatan kepada seluruh jajaran pemda,” kata Syamrisal.

Upaya tersebut sejalan dengan perkembangan agenda antikorupsi nasional yang sejak berdirinya KPK pada 2002 semakin menempatkan pencegahan, pengawasan, dan integritas penyelenggara negara sebagai bagian penting tata kelola pemerintahan. Secara internasional, pemberantasan korupsi juga mendapat kerang-

ka bersama melalui United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2003, termasuk pengaturan mengenai pencegahan dan penguatan integritas sektor publik.

Pemkab Buton Selatan dan Kejaksaan sebelumnya telah membangun sinergi dalam penguatan tata kelola serta pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah daerah berharap peningkatan integritas aparat berkontribusi terhadap pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. “Kita berharap, di Buton Selatan ini dapat benar-benar mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana korupsi, sehingga kepuasan masyarakat semakin meningkat,” tegas Syamrisal. (*)

Mulai 1 Oktober, Super Air Jet Kembali Layani Rute Makassar-Baubau Setiap Hari, Tiket Dibawah Rp1 Juta

Selain menambah pilihan penerbangan, kehadiran kembali SAJ diharapkan memberikan dampak terhadap keterjangkauan harga tiket. Anas mengatakan harga penerbangan yang sebelumnya dapat mencapai Rp1,7 juta diharapkan bisa ditekan melalui layanan tersebut, dengan upaya harga berada di bawah Rp1 juta.

“Harapannya, seluruh masyarakat Kepulauan Buton bisa menikmati penerbangan dengan harga terjangkau. Selama ini harga tiket bisa mencapai Rp1,7 juta, ke depannya kami upayakan agar lebih murah dan harga di bawah Rp1 juta,” ujarnya.

Anas mengatakan keberlanjutan layanan penerbangan juga telah disiapkan melalui kerja sama yang dituangkan dalam jaminan

garansi. Langkah itu sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai kelangsungan penerbangan setelah periode layanan sebelumnya. “Insyaallah per 1 Oktober siap beroperasi. Semua hal dalam kontrak sudah dipenuhi,” katanya.

Secara operasional, penerbangan Makassar-Baubau dijadwalkan berangkat pukul 08.30 WITA dan tiba pukul 09.30 WITA. Penerbangan yang bermalam di Baubau dijadwalkan berangkat pukul 06.30 WITA dan tiba di tujuan pukul 15.00 WITA. Tiket dapat dibeli melalui saluran penjualan daring. Pihak Bandara Betoambari menyatakan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan layanan.

Kembalinya penerbangan ini

sekalius melanjutkan sejarah panjang Betoambari sebagai simpul transportasi udara Buton. Bandara tersebut mulai dibangun pada 1975/1976 dan diresmikan sebagai lapangan terbang perintis pada 22 Oktober 1976. Pada 1984, pengelolaannya beralih kepada Departemen Perhubungan dan namanya menjadi Bandar Udara Betoambari Baubau. Dalam konteks nasional, penerbangan sipil Indonesia sendiri berkembang sejak masa awal kemerdekaan; Garuda Indonesian Airways lahir pada 1949 dan penerbangan perdananya berlangsung pada 28 Desember tahun yang sama. (*)

Kemenhaj Busel Matangkan Persiapan Haji, Geo-Visa 21 Jemaah Capai 50 Persen

dan sesuai ketentuan.

“Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada kendala berarti. Pengurusan paspor berjalan sangat baik berkat pelayanan petugas Imigrasi, dan pemeriksaan kesehatan jemaah juga sudah beres,” kata Nurhayati saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/9/2026).

Selain penyelesaian dokumen perjalanan dan pemeriksaan kesehatan, Kemenhaj juga melanjutkan proses geo-visa sebagai bagian dari persiapan perjalanan jemaah ke Arab Saudi. Mekanisme administrasi berbasis data dan dokumen perjalanan menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan haji modern yang melibatkan jutaan jemaah dari berbagai negara.

Indonesia sendiri telah memi-

liki sejarah panjang dalam penyelenggaraan perjalanan haji. Setiap musim haji, pemerintah harus mengoordinasikan berbagai tahapan, mulai dari dokumen perjalanan, kesehatan, transportasi, akomodasi hingga layanan jemaah di Arab Saudi. Secara global, penyelenggaraan haji juga terus berkembang mengikuti kebutuhan pengelolaan jemaah dalam jumlah besar dan pemanfaatan teknologi administrasi.

Dalam konteks pengawasan layanan, Kemenhaj pada September 2026 meluncurkan kebijakan bertajuk “Bongkar Mafia Haji dan Umrah”. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelayanan haji dan umrah sekaligus mendorong keterbukaan dalam setiap tahapan

penyelenggaraan.

“Kami mengimbau masyarakat Buton Selatan: jika menemukan pelayanan yang kurang memuaskan atau praktik pungutan liar, jangan ragu untuk melaporkan langsung kepada kami,” ujar Nurhayati.

Kemenhaj Buton Selatan memastikan proses persiapan 21 calon jemaah akan terus dikawal hingga tahapan keberangkatan. Pengawasan mencakup kelengkapan administrasi, proses visa, pemeriksaan kesehatan, serta pelayanan jemaah agar berlangsung aman, tertib, transparan, dan bebas dari pungutan tidak sah. (*)

Sembilan Hari Jalani Kaombo, 110 Gadis Lontoi-Karae di Siompu Rawat Tradisi Leluhur

BUTON SELATAN, BP-Tradisi Pingitan Massal atau Kaombo kembali digelar masyarakat Desa Lontoi-Karae, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Sebanyak 110 gadis mengikuti rangkaian prosesi adat yang berlangsung selama sembilan hari, 15-23 September 2026, sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya masyarakat Buton.

Rangkaian Kaombo dilaksanakan di sejumlah rumah warga dan Baruga Desa Lontoi-Karae. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Desa

Lontoi dan Lembaga Adat Desa, dengan melibatkan masyarakat serta para pemangku adat. Pelaksanaannya diarahkan untuk memastikan nilai-nilai tradisi tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda.

Kehadiran Wakil Bupati Buton Selatan La Ode Risawal pada malam puncak, Selasa (22/9/2026), menandai dukungan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan tradisi tersebut. Sejumlah pejabat dan tokoh adat turut hadir, di antaranya Camat Siompu, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Parabela Desa Kaimbulawa, Para-

bela Desa Lontoi, kepala desa se-Kecamatan Siompu, tokoh masyarakat, serta pemangku adat.

Dalam tata kehidupan masyarakat Buton, pingitan atau Posuo memiliki makna lebih luas daripada sekadar seremoni adat. Ritual tersebut menjadi bagian dari proses penyucian dan pendewasaan diri bagi gadis remaja atau perempuan yang akan memasuki usia pernikahan. Di dalamnya terdapat pembelajaran mengenai moral, tata krama, spiritualitas, serta kesiapan mental dan fisik

Baubau Masuk Dua Besar TPID Berkinerja Terbaik Sulawesi Tahun 2026

TPID pada era 2000-an, sementara koordinasi pengendalian inflasi nasional diperkuat melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan berbagai kebijakan stabilisasi pangan, distribusi, serta harga.

Dalam perkembangannya, pengendalian inflasi juga menjadi agenda ekonomi di berbagai negara. Lonjakan harga pangan dan energi yang terjadi secara global, terutama setelah pandemi Covid-19 dan gangguan rantai pasok internasional, menunjukkan bahwa stabilitas harga sangat dipengaruhi kondisi domestik sekaligus perkembangan ekonomi dunia.

Di Baubau, penguatan pengendalian inflasi dilakukan melalui

pemantauan ketersediaan dan distribusi bahan pokok, koordinasi lintas sektor, serta upaya menjaga keterjangkauan harga. Pemerintah daerah juga melibatkan instansi terkait, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pasokan dan harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali.

Yusran menegaskan Pemkot Baubau akan mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja TPID melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor. “Prestasi TPID Award 2026 ini menjadi bukti bahwa kerja bersama dan sinergi lintas sektor merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas harga, pasokan, serta daya beli masyarakat di Kota Baubau,” katanya. (*)

Bupati Azhari Terima Tim Kemensos untuk Verifikasi Aset SR Buteng, Program Pendidikan Disiapkan Bertahap

lanbelas November (USN) untuk kepentingan masyarakat dan pihak yang membutuhkan di Buton Tengah.

Menurut Azhari, rencana pemanfaatan aset tersebut mendapat dukungan dari tim Kemensos. Pemerintah daerah kini tinggal menunggu proses administrasi berupa surat resmi sebelum pemanfaatannya dapat ditindaklanjuti. Langkah itu menjadi bagian dari persiapan daerah agar sarana pendukung program SR dapat tersedia sesuai kebutuhan.

Azhari sekaligus meluruskan anggapan bahwa penempatan SR dan SNT di Buton Tengah berkaitan langsung dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ia menjelaskan, SR merupakan kebijakan nasional yang diarahkan Presiden agar setiap kabupaten/kota memiliki program tersebut. “Alhamdulillah, Buton Tengah masuk tahap pertama,” kata Azhari.

Pada tahap awal, pembangunan SR secara nasional mencakup sekitar 60 lokasi. Pemerintah daerah di berbagai wilayah kemudian mengajukan usulan agar daerahnya dapat menjadi bagian dari program tersebut. Karena itu, menurut Azhari, penetapan lokasi tidak semata-mata menggunakan ukuran tinggi atau rendahnya IPM sebagai dasar.

Selain SR, Buton Tengah juga

masuk tahap pertama pembangunan SNT yang secara nasional hanya mencakup 17 titik. Pemerintah daerah berharap seluruh persiapan dapat berjalan sesuai tahapan sehingga pembangunan SNT di Buton Tengah dapat direalisasikan pada 2027. Kedua program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Secara historis, gagasan Sekolah Rakyat di Indonesia berkaitan dengan upaya memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan sosial dan ekonomi. Negara-negara lain juga memiliki berbagai model pendidikan berasrama atau sekolah publik untuk memperluas akses bagi kelompok rentan, meski bentuk, tata kelola, dan sasaran programnya berbeda. Dalam konteks Indonesia, penguatan akses pendidikan terus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional sejak era awal kemerdekaan.

Dengan masuknya Buton Tengah dalam dua program tahap awal tersebut, pemerintah daerah kini berfokus pada penyelesaian aspek administratif, aset, dan kesiapan sarana. Verifikasi Kemensos pada 23 September menjadi salah satu tahapan penting sebelum dukungan aset untuk SR ditindaklanjuti, sementara pembangunan SNT dipersiapkan untuk dapat dimulai pada tahun berikutnya. (*)



menghadapi kehidupan dewasa.

Selama menjalani prosesi, peserta ditempatkan di ruang khusus yang disebut suo dan didampingi perempuan senior yang dikenal sebagai bisa’. Para peserta memperoleh nasihat dan bimbingan sekaligus menjalani berbagai tahapan ritual yang mengandung pesan mengenai kehidupan, tanggung jawab, dan tata nilai dalam masyarakat adat.

Tradisi pingitan merupakan bagian dari kekayaan budaya Buton yang berkembang dalam lingkungan Kesultanan Buton. Secara historis, Kesultanan Buton berkembang sejak abad ke-14 dan menjadi salah satu pusat pemerintahan serta kebudayaan di kawasan Sulawesi Tenggara. Warisan adatnya kemudian tetap hidup di tengah masyarakat meskipun struktur kesultanan tidak lagi menjadi pemerintahan negara modern. Dalam konteks yang lebih luas, pelestarian tradisi semacam ini

sejalan dengan perhatian dunia terhadap perlindungan warisan budaya takbenda yang diperkuat melalui Konvensi UNESCO 2003 tentang Intangible Cultural Heritage.

Salah satu tokoh adat mengatakan keberlanjutan Kaombo tidak hanya berkaitan dengan mempertahankan sebuah ritual, tetapi juga menjaga identitas budaya masyarakat. “Tradisi ini tidak hanya milik masa lalu, melainkan jati diri kita yang harus terus dihidupkan, agar anak cucu kelak tetap mengenal dan mencintai warisan leluhur,” ujarnya.

Pelaksanaan Kaombo di Lontoi-Karae memperlihatkan keterlibatan masyarakat, lembaga adat, dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal. Dengan melibatkan generasi muda sebagai peserta, tradisi tersebut sekaligus menjadi ruang transmisi pengetahuan adat agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak terputus oleh perubahan zaman. (*)

Kekeringan Meluas di Baubau, Tujuh Kecamatan Kini Berstatus Awas



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Kekeringan di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, meluas pada akhir September 2026. Sebanyak tujuh dari delapan kecamatan kini berstatus awas, sementara pemerintah daerah mencatat 116 kejadian kebakaran sejak awal tahun dan dampak kekeringan terhadap 28,20 hektare sawah di Kecamatan Bungi.

Status awas berlaku 21-30 September 2026 berdasarkan Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Dasarian III September yang diterbitkan Stasiun Meteorologi Kelas III Betoambari Baubau melalui surat Nomor e.B/KL.00.02/017/KBW/IX/2026 tertanggal 22 September 2026. Tujuh kecamatan tersebut ialah Batupoaro, Betoambari, Bungi, Kokalukuna, Lea-Lea, Murhum dan Wolio. Kecamatan Sorawolio berada pada status siaga.

Sekretaris Daerah Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si., mengatakan perluasan status tersebut menunjukkan kondisi yang lebih serius dibandingkan Dasarian III Agustus 2026. Saat itu, hanya Bungi yang berstatus awas. “Status awas di tujuh kecamatan berarti periode paling berisiko belum terlewati. Kami meminta seluruh perangkat daerah bekerja dengan satu data dan satu jadwal,” kata

Darus Salam usai memimpin rapat koordinasi Satgas Penanganan Dampak El Nino di Kantor Wali Kota Baubau, Rabu (23/9/2026).

Pemetaan pemerintah menunjukkan sejumlah wilayah memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi, antara lain Kelurahan Lipu, Katobengke, Sulaa, Labalawa dan Waborobo di Kecamatan Betoambari, serta sebagian besar wilayah Bungi, Lea-Lea dan Sorawolio. Di Kecamatan Wolio, titik kerawanan terkonsentrasi di kawasan Bukit Wolio Indah, Kadolo dan Kadolomoko. Hingga 22 September, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencatat 116 kebakaran dengan luasan lahan terbuka dan semak yang terbakar sekitar 37 hektare serta penggunaan air pemadaman mencapai sekitar 800.000 liter.

Tekanan kekeringan juga merambah sektor pangan. Sebanyak 28,20 hektare sawah milik tujuh kelompok tani di Kelurahan Ngkar-ing-Karing, Kampeonaho dan Walia-buku, Kecamatan Bungi, terdampak. Dari luasan tersebut, 4,70 hektare mengalami rusak berat dan 2,50 hektare mengalami puso atau gagal panen. Pemerintah akan menyediakan pompa, mengatur distribusi air secara bergilir, serta menghitungkan kerugian sebagai dasar pengusulan bantuan

bagi petani.

Untuk merespons kondisi tersebut, Satgas yang melibatkan perangkat daerah, Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri dan para camat menetapkan penanganan lintas sektor. Pemerintah akan menjaga status siaga kemarau dan kebakaran hingga musim hujan stabil, mengaktifkan saluran kedaruratan kebakaran, memperkuat relawan kelurahan, menambah titik pengambilan air armada pemadam dan menyalurkan air secara terjadwal ke wilayah yang mengalami gangguan aliran.

Kebijakan tersebut juga akan diperkuat melalui Instruksi Wali Kota mengenai pembagian tugas perangkat daerah, camat dan lurah serta Surat Edaran tentang larangan pembakaran terbuka. “Kami meminta masyarakat menahan diri untuk tidak membakar apa pun, sekecil apa pun. Api kecil pada kondisi kekeringan seperti sekarang dapat meluas dalam hitungan menit,” ujar Darus Salam. Warga juga diminta menghemat air, tidak membuang puntung rokok sembarangan, memeriksa instalasi listrik, membersihkan rumput dan ranting kering tanpa membakarnya, serta segera melaporkan titik api kepada petugas pemadam, lurah atau BPBD.

Atasi Blank Spot, Diskominfo Baubau Siapkan Penguat Sinyal di Waborobo



Laporan: Andina

BAUBAU, BP- Persoalan kualitas jaringan telekomunikasi di Kelurahan Waborobo, Kota Baubau, mulai ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan menyiapkan lokasi pembangunan infrastruktur penguat sinyal. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Baubau telah menetapkan dua titik yang dinilai strategis, yaitu kawasan Lapangan Sepak Bola dan sekitar Rumah Adat Waborobo.

Pemetaan itu dilakukan melalui survei lapangan yang melibatkan Tim Survei Diskominfo Baubau dan pemerintah Kelurahan Waborobo pada Selasa (22/9/2026). Peningkatan tersebut merupakan respons atas permintaan masyarakat yang selama ini menghadapi kondisi sinyal lemah hingga wilayah tanpa layanan atau blank spot.

Kepala Diskominfo Kota Baubau H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si., mengatakan keberadaan infrastruktur penguat sinyal diperlukan untuk menjawab kebutuhan komunikasi masyarakat di kawasan tersebut. “Peningkatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan masyarakat terkait penyediaan infrastruktur penguat sinyal telekomunikasi,” kata Andi.

Menurut dia, kedua lokasi yang disurvei memiliki pertimbangan administratif karena berada di atas aset tanah milik pemerintah. Status lahan tersebut dapat

membantu proses legalitas sekaligus memudahkan pemanfaatan lahan apabila salah satu titik ditetapkan sebagai lokasi pembangunan.

Selain aspek lahan, pemerintah daerah juga memperhatikan penerimaan masyarakat. Tim survei telah memperoleh persetujuan dan dukungan tertulis dari warga Waborobo. Dokumen tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum rencana pembangunan memasuki pembahasan teknis lebih lanjut.

Diskominfo Baubau juga telah berkomunikasi dengan PT Telkom sebagai operator telekomunikasi. Koordinasi awal itu, menurut Andi, mendapat respons positif dan belum menemukan kendala berarti. “Kami sudah membangun komunikasi awal dengan pihak operator dan responsnya positif,” ujarnya.

Pembahasan berikutnya akan mencakup kebutuhan perangkat, kapasitas layanan, serta sistem transmisi yang diperlukan. Aspek teknis tersebut penting untuk menentukan bentuk infrastruktur yang sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan layanan komunikasi di Waborobo.

Langkah pemerintah daerah itu berlangsung ketika konektivitas digital telah menjadi bagian penting dari aktivitas sosial dan ekonomi. Secara global, sejarah kesenjangan akses telekomunikasi telah menjadi perhatian sejak dekade 1980-an. Laporan The Missing Link yang di-

terbitkan International Telecommunication Union (ITU) pada 1985 menyoroti ketimpangan perkembangan telekomunikasi antara negara-negara yang telah maju dan negara-negara yang tertinggal dalam pembangunan jaringan.

Perkembangan teknologi internet kemudian memperluas makna akses telekomunikasi. Persoalan tidak lagi hanya menyangkut tersedianya jaringan, tetapi juga kualitas, keterjangkauan, dan kemampuan masyarakat memanfaatkannya. ITU memperkirakan pada 2025 sekitar tiga perempat penduduk dunia telah menggunakan internet, sementara sekitar 2,2 miliar orang masih belum terhubung.

Di Indonesia, perluasan infrastruktur telekomunikasi juga berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menjalankan berbagai program pembangunan jaringan, termasuk penyediaan infrastruktur untuk wilayah yang secara geografis maupun ekonomi belum sepenuhnya terlayani operator.

Kondisi tersebut membuat persoalan blank spot di tingkat kelurahan tetap menjadi bagian dari agenda pemerataan konektivitas. Di Waborobo, pemerintah daerah kini berada pada tahap survei lokasi, pengumpulan dukungan masyarakat, dan koordinasi teknis dengan operator.

Setelah titik pembangunan dan kebutu-

han teknis disepakati, proses selanjutnya dapat diarahkan pada penyediaan infrastruktur penguat sinyal. Pemerintah Kota Baubau berharap langkah tersebut dapat memperluas jangkauan layanan telekomunikasi dan meningkatkan akses masyarakat Waborobo. (*)

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU Jl. Sijawangkati NO.09, Kel. Lamangga,Kec. Murhum Baubau,Tip (0402) 2821936					
PENGUMUMAN TENTANG SERTIFIKAT HILANG Nomor : 23/D1304-21.06/IX/2026					
Untuk mendapatkan Sertifikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :					
No	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	Keterangan
01	21.16.03.06.1.00576	ABDUL RAHMAN	-	17/12/2004	Laporan Kehilangan Barang/Surat Penting Nomor: SLKB/1851/VIII/ YAN.2.4/2026/SULTRA/SPK SEK-Laporan Pernyataan di Bawah Sumpah Tanggal 11 September 2026
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.					
Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut diatas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.					
Nomor Berkas : 10251/2026 Nama Pemohon : SAHARUDIN D1301 : 3290/2026			BAUBAU, 14 September 2026 Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Baubau Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau ttd YUSUF NIP. 197110041993031003		